

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198603 1 007

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
4. pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
5. pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
7. pengarahan dan pengordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. pengordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dst.

## **B. Struktur Jabatan**

Struktur organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

## Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan Strategis :				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	92,78	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	Formulasi : Jumlah DTKS tahun N - Jumlah DTKS tahun N-1 / Jumlah DTKS tahun N-1 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2,16	Formulasi : Total Fertility Rate tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BKKBN

4

*Laporan Kinerja Triwulan IV KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2025*

Sasaran Strategis :

1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75,92	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N  Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik  Sumber data : Inspektorat
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00	Formulasi : Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan  Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik  Sumber data : Dinsos P2KB
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,60	Formulasi : Jumlah peserta KB aktif dibagi Pasangan Usia Subur x 100%  Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik  Sumber data : Dinsos P2KB

**B. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Tujuan Strategis Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	89,88	89,88 persen	93,49 persen	104,01 %
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	3,00 persen	4,86 persen	162,05 %
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate	Total Fertility (Angka)	2,16	2,16 persen	n/a	n/a

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
	(Angka Kelahiran Total)	Kelahiran Total (IKK Outcome)				
	<b><i>Rata-rata Capaian</i></b>					133,03 %

**Tabel 2.4**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Stategis Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	89,88	76,35 persen	76,35 persen	101,94 %
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Percentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00	5,00 persen	5,76 persen	115,18 %
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Percentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,60	67,60 persen	61,12 persen	90,42%
	<b><i>Rata-rata Capaian</i></b>					102,51 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 102,51 % dengan kategori ***“Sangat Berhasil”***.

Faktor penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya perhitungan TFR yang rilis dari BKKBN
2. Sasaran strategis meningkatnya kepesertaan KB aktif dengan indikator kinerja persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan target 67,60 % terealisasi 61,12 %. Hal ini dikarenakan antara lain :
  - Budaya Patriarki di Kota Pekalongan masih cukup tinggi sehingga keputusan kepesertaan KB tidak sepenuhnya atas keinginan perempuan tetapi juga atas persetujuan laki-laki.
  - Masih adanya tantangan terkait pandangan masyarakat terhadap kepesertaan KB yang dihubungkan dengan agama.
  - Pengetahuan masyarakat terkait pengaturan kelahiran terhadap dampak kesehatan, sosial dan ekonomi masih belum optimal.
  - Kurang optimal dalam konseling terkait pengaturan kelahiran dan kesertaan KB.
  - Kurang optimalnya stakeholder dalam upaya kesuksesan kesertaan KB.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan bidang terkait
2. Optimalisasi sumber daya yang ada

### **Capaian Anggaran**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.752.490.000	Rp. 3.752.490.000	Rp. 3.495.782.808	93,16%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 465.136.000	Rp. 465.136.000	Rp. 456.126.192	98,06%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.754.791.000	Rp. 1.754.791.000	Rp. 1.711.337.362	97,52%
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 1.268.700.000	Rp. 1.268.700.000	Rp. 1.238.191.982	97,60%
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 390.592.000	Rp. 390.592.000	Rp. 282.705.491	72,38%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 109.054.000	Rp. 109.054.000	Rp. 106.390.748	97,56%
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 205.380.000,-	Rp. 205.380.000,-	Rp. 198.647.210	96,72%
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.742.610.000	Rp. 1.742.610.000	Rp. 1.520.394.230	87,25%
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.614.420.000	Rp. 1.614.420.000	Rp. 1.611.054.910	99,79%
<b>Rata-rata Capaian</b>					93,96%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 93,96%

9

*Laporan Kinerja Triwulan IV KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2025*

# BAB III

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 102,51 % , sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,96%. Maka terdapat efisiensi pengguna sumber daya sebesar 9,09 %

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Tim dengan OPD terkait dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; dengan mengikuti diklat / bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan, strategi pencapaian SPM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih efisien;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan perencanaan / pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui

Wali Kota Pekalongan,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Pekalongan,



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., M.M**

**YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si**

NIP. 19660516 198603 1 007

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**SEKRETARIS**

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN



Nur Agustina, S.Psi.MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197208172006042003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A    Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	1
B    Struktur Jabatan .....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	3
A    Perjanjian Kinerja .....	3
B    Capaian Kinerja .....	4
C    Capaian Anggaran .....	10
BAB III PENUTUP .....	12
A    Kesimpulan .....	12
B    Rekomendasi .....	12

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan .....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal .....	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan .....	5
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja .....	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	2
--------------------------------------	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
2. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
3. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
4. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
5. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,perpustakaan, dan kearsipan;
6. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
7. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
8. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
10. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
11. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

---

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan III Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja atau Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	100 persen	100
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100
3	Tercapainya pengadaan/pem eliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pem eliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100
<b><i>Rata-rata Capaian</i></b>						<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil. Hal ini antara lain disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu :

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas direncanakan secara matang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan sesuai target dan tepat waktu. Hal ini disebabkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas direncanakan secara matang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya.
4. Kerjasama tim pelaksana kegiatan di Sekretariat baik dari Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan maupun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bekerjasama secara sinergis dan harmonis, saling mendukung untuk kelancaran, percepatan pelaksanaan kegiatan.
5. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia baik dari sisi SDM maupun dari sisi alokasi anggaran/keuangan di Sekretariat Dinsos P2KB.
6. Selalu berpedoman pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dan selalu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

## **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sekretariat sebagai pendukung pelayanan bagi seluruh aparatur SKPD berperan besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja SKPD. Dengan pelayanan yang baik, bidang-bidang sebagai pelaksana pelayanan langsung ke masyarakat juga akan berjalan dengan baik dan optimal sehingga kinerja organisasi akan meningkat.

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja atau Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja pada triwulan IV tercapai 73,34 persen hal ini didukung oleh
  - Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 2025 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan RKA dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
  - Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan Target kinerja berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN serta jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dimana gaji dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
- b. Persentase ketercapaian ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah capaian kinerja yang didukung oleh ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah. ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan kegiatan ini antara lain berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan, serta penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai target yang telah ditetapkan. Serta disupport juga oleh ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa

- komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
- c. Persentase ketercapaian pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah dengan indikator persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah capaian kinerja pada triwulan IV, didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

### **Rencana Tindak lanjut**

Dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, maka harus dirumuskan rencana tindak lanjut agar pencapaian sasaran kinerja bisa maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut sekretariat adalah sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan
- 2. Mengevaluasi capaian kinerja Triwulan IV untuk dijadikan pedoman dalam perbaikan kinerja triwulan pada tahun 2026
- 3. Menyusun anggaran kas yang menyesuaikan kebutuhan sesuai evaluasi tahun 2025
- 4. Mengusulkan perubahan standarisasi harga untuk penyusunan RKA 2026 terhadap harga-harga yang belum terakomodir dalam standarisasi harga.

## B. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Realisasi Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.270.000	24.270.000	24.199.000	99,77
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.549.643.000	2.549.643.000	2.336.701.050	96,33
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.445.000	324.445.000	324.127.456	99,79
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.832.000	317.832.000	316.569.098	99,73
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.517.000	494.517.000	494.186.204	99,94
<b><i>Rata-rata Capaian</i></b>					<b>99,11</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 99,11 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,11 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100 %, terdapat selisih realisasi antara kinerja dengan anggaran sebesar 0,89% hal ini belum bisa disimpulkan sebagai efisiensi anggaran karena target kegiatan belum selesai secara keseluruhan dilaksanakan.

## **BAB III**

## **PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan telah dapat dilaksanakan secara optimal sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan.
2. Strategi yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan target yang telah ditetapkan antara lain melalui :
  - a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta jajarannya
  - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan beserta jajarannya
  - c. Mencermati kembali jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan karena akan berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja kegiatan.
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja maupun keuangan Dinsos P2KB minimal setiap triwulan.
3. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Triwulan IV sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,11 %, dan dapat disimpulkan sebagai efisiensi

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk peningkatan perencanaan kinerja dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih optimal dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mengoptimalkan capaian kinerja.
2. Mempertahankan kinerja tim khususnya di Sekretariat , meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan bidang P2KB, Bidang Dayalin Sos dan Bidang Rehabsos serta memberikan pelayanan yang prima kepada Mitra kerja di Dinsos P2KB Kota Pekalongan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui  
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN

SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN



**YOS ROSYIDI, S. I. P., M. Si**  
NIP. 19660516 198603 1 007

**NUR AGUSTINA, S.Psi.MM**  
NIP. 19720817 200604 2 003

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN**

**JAMINAN SOSIAL**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**

**BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN 2025**

---

*Laporan Kinerja Triwulan III* KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN  
JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026  
Kepala Bidang Pemberdayaan,  
Perlindungan dan Jaminan Sosial



AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng  
Pembina

**Laporan Kinerja Triwulan III KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2025**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
3. pengordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
4. pengordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. pengordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
6. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
7. pengordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dst.

**Laporan Kinerja Triwulan III KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2025**

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Laporan Kinerja Triwulan III/KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN  
JAMINAN SOSIAL| DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
2025



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	Formulasi : (Jumlah PSKS yang diberikan fasilitasi / jumlah PSKS secara keseluruhan) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
2	Terlaksananya Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	Formulasi : (Jumlah KPM Bansos (BPNT, PKH, PBI dll) tahun n / jumlah DTKS atau nama lain tahun n) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah TMP yang dipelihara/direhab / target jumlah TMP yang akan dipelihara/direhab x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

#### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**  
**Triwulan IV Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	100 persen	133,3 persen
2	Terlaksananya Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	53,73 persen	70,65 persen	131,48 persen
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>121,59%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebesar 121,59 % dengan kategori sangat berhasil. Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama TIM antara bidang dayalinjamsos
2. Ketepatan dalam bekerja

## Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp. 165.448.000	Rp. 165.448.000	Rp. 164.508.915	99,43 %
2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 299.688.000	Rp. 299.688.000	Rp. 291.617.277	97,3%
3	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.268.700.000	Rp. 1.268.700.000	Rp. 1.238.191.982	97,56%
4	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 109.054.000	Rp. 109.054.000	Rp. 106.390.748	96,83 %
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>97,71%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 97,71 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,71%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 121,59%, maka bisa dilihat capaian kinerja jauh lebih tinggi dari realisasi anggaran 24,43 %.

# **BAB III**

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 121,59% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 97,71 %.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan jaminan Sosial Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

“Untuk tetap bisa menjaga capaian kinerja dan serapan anggaran “

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Kepala Bidang Pemberdayaan,  
Perlindungan dan Jaminan Sosial,

\${ttd2}



**YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si**

NIP. 19660516 198603 1 007

**AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng**

NIP. 19740923 200501 1001

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025

KABID P2KB DINAS SOSIAL PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA  
PEKALONGAN



SUPROBO,SH

Pembina Tingkat I  
NIP. 197208172006042003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A    Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	1
B    Struktur Jabatan .....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	3
A    Perjanjian Kinerja .....	3
B    Capaian Kinerja .....	4
C    Capaian Anggaran .....	10
BAB III PENUTUP .....	12
A    Kesimpulan .....	12
B    Rekomendasi .....	12

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KabidP2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan .....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal .....	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan .....	5
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja .....	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	2
--------------------------------------	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

---

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. penyelenggaraan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
6. penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (K1E)
7. pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
8. pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluhan KB! petugas lapangari KB (PKB / PLKB) ;
9. penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
10. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan her-KB;
11. penyelenggaraan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. penyelenggaraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  
13. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
14. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

---

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Tercapainya rumah tangga yang dilakukan pendataan / updating data keluarga	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan / updating data keluarga	100 persen	Formulasi : (Jumlah rumah tangga yang dilakukan pendataan / jumlah seluruh rumah tangga sekota * 100%) Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB Kota Pekalongan.
2	Tercapainya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persentase Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	Formulasi : (Jumlah usia nikah yang kurang dari 21 tahun / jumlah nikah keseluruhan)*100% Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB Kota Pekalongan
3.	Tercapainya Unmeet need KB	Unmeet need KB	13 persen	Formulasi : (Jumlah usia nikah yang kurang dari 21 tahun / jumlah nikah keseluruhan)*100% Tipe capaian : Semakin Rendah Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB Kota Pekalongan

---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 205,380,000	APDB-P / DAK Non Fisik
2. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 899,576,000	APDB-P / DAK Non Fisik
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 843,034,000	APDB-P / DAK Non Fisik
4. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Rp 1,614,420,000	APDB-P / DAK Non Fisik

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menjukkan semakin tingginya kinerja atau

- semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:
- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Targe}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

- Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian target}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target sd Triwulan IV	Realisasi sd Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya rumah tangga yang dilakukan pendataan / updating data keluarga	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan / updating data keluarga	100 persen	100 persen	97,45 persen	97,45

2	Tercapainya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persentase Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	100 persen	19.43 persen	61.77 Persen
3	Tercapainya Unmeet need KB	Unmeet need KB	13 persen	100 persen	2,78 persen	467.48 Persen
<b><i>Rata-rata Capaian</i></b>						208,9 Persen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang P2KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebesar 208,9 % dengan kategori Sangat Berhasil Hal ini antara lain disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu :

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak / stakeholder terkait ;
2. Adanya dukungan / komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.

Faktor penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV antara lain :

1. Bahwa capaian indikator kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025 ;
2. Bahwa target sasaran program dihitung sebagai target tahunan yang angka perhitungannya diperoleh pada akhir tahun 2025 / awal Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## B Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Realisasi Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	205,380,000	205,380,000	198,647,210	96,72
2	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	899,576,000	899,576,000	873,888,161	97,14
3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	843,034,000	843,034,000	646,506,069	76.69
4	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	1,614,420,000	1,614,420,000	1,611,054,910	99.79
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>93.48</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar 93.48%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93.48%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100 %, terdapat selisih realisasi antara kinerja dengan anggaran sebesar 6,35 % hal ini belum bisa disimpulkan sebagai efisiensi anggaran karena target kegiatan belum selesai secara keseluruhan dilaksanakan.

# BAB III

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 93.48% .

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk peningkatan perencanaan kinerja dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Kabid P2KB pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Triwulan Tahun 2025 menggunakan sasaran program dan indikator kinerja berdasarkan sasaran program yang ditentukan ;
2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM menyebabkan pelaksanaan dan penyelesaian sub kegiatan perlu ditingkatkan agar indikator kinerja bisa tercapai secara optimal.

Mengetahui  
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, S. I. P., M. Si  
NIP. 19660516 198603 1 007

Pekalongan, 2 Januari 2025  
KABID P2KB DINAS SOSIAL  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN



SUPROBO, SH  
NIP. 19720905 199203 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## **LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

### **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19851026 201001 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	2
DAFTAR ISI -----	3
DAFTAR TABEL -----	4
DAFTAR GAMBAR -----	5
BAB I PENDAHULUAN -----	6
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan -----	6
B Struktur Jabatan -----	7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN -----	8
A Perjanjian Kinerja -----	8
B Capaian Kinerja -----	9
C Capaian Anggaran -----	11
BAB III PENUTUP -----	12
A Kesimpulan -----	12

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
Tabel 2.2 Pengukuran Skala Ordinal .....	9
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja .....	10
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung .....	11

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	7

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
2. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
4. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan i titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
5. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
6. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
7. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
8. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
9. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

---

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial  
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Tercapainya penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persentase disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	Formulasi : (Jumlah PSKS disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang diberikan pelayanan sosial/ jumlah seluruh disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB
2	Tercapainya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	Formulasi : (Jumlah Korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial/ seluruh korban bencana) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DinsosP2KB

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial**  
**Triwulan IV Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persentase disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	Tercapainya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
<b><i>Rata-rata Capaian</i></b>						<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama tim antar personel bidang rehabsos
2. Ketepatan dalam bekerja

### C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.185.403.000	Rp. 1.185.403.000	Rp. 1.177.572.669	99,34 %
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 569.388.000	Rp. 569.388.000	Rp. 533.250.693	93,65 %
3	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 390.592.000	Rp. 390.592.000	Rp. 282.705.491	72,38 %
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>92,92 %</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 92,92 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 92,92%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 107,62%.

# BAB III

# PENUTUP

---

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,95 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 105,31%.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penetapan capaian

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



**YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si**  
NIP. 19660516 198603 1 007

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



**WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si**  
NIP. 19851026 201001 1 005

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026  
Kasubag Perencanaan Evaluasi dan  
Keuangan



**YULIA MAULIDA, SE**  
PENATA  
NIP. 197907191998032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag renval dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
4. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. melaksanakan fungsi akuntansi;
7. menyusun bahan dan pengordinasian laporan keuangan;
8. menyusun bahan profil perangkat daerah;
9. mengelola data dan informasi;
10. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
12. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
13. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

### B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasubag Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

## 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan**  
**Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1.	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + persentase capaian sub kegi koordinasi penyusunan Dokumen RKA -SKP + Persentase capaian su keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3 Tipe capaian : semakin tinggi semakin baik Sumber data : DinsosP2KB
2.	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keg Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keg Koordinasi dan penyusunan

				Lap Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DinsosP2KB
--	--	--	--	--

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

**Tabel 2.2**  
**Pengukuran dengan Skala Ordinal**

<b>Skala Ordinal</b>	<b>Predikat / Kategori</b>
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan**  
**Triwulan IV Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Persentase ketercapaian adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pelaksana
2. Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran
3. Pemanfaatan teknologi informasi
4. Kolaborasi antar stakeholder

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antar stakeholder
2. Kurangnya SDM yang kompeten dan handal
3. Penyajian data yang tidak akurat

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis data
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder

### **Capaian Anggaran**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel. 2.4**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.270.000,-	24.270.000,-	24.199.000,-	99,71
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.591.426.000,-	2.591.426.000,-	2.336.701.050,-	90,17
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>94,94</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 94,94 % dengan katagori sangat tinggi/sangat berhasil.

# BAB III

# PENUTUP

---

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,94 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,33 %.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis data
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui  
SEKRETARIS



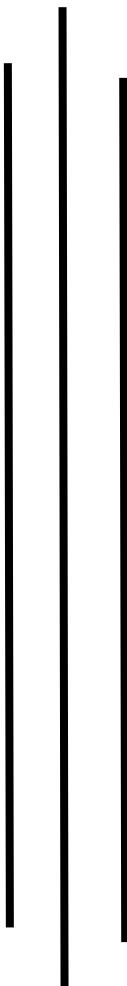
**NUR AGUSTINA,S.P.si.,M.M**  
NIP. 197008172006042004

Kasubag Perencanaan Evaluasi  
dan Keuangan



**YULIA MAULIDA, SE**  
NIP. 197907191998032002

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubbag Umum dan kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**TUKIJO S.H.**

Penata

NIP. 19701025 200701 1 011

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kasubbag umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
3. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
4. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
5. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
6. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

#### **B. Struktur Jabatan**

Struktur organisasi jabatan kasubbag umum dan kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil

65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	0	0	0
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	1 Paket	1 Paket	100
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Paket	1 Paket	100
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Paket	1 Paket	100
<b>Rata-rata Capaian</b>						100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag umum dan kepegawaian adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Ketepatan koordinasi dan komunikasi yang sesuai

## C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Realisasi Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	-
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.445.000,-	324.445.000,-	324.127.456,-	99,90%
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.832.000,-	317.832.000,-	316.569.098,-	99,60%
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.517.000,-	494.517.000,-	494.186.204,-	99,93%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>99,81%.</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 99,81%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 99,83 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,02.

## **BAB III PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,81%.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pencermatan kembali dalam penyusunan anggaran, target dan realisasi.
2. Pelaksanaan Kegiatan agar segera dilaksanakan lebih awal sesuai target yang telah ditentukan.
3. Untuk menunjang kinerja agar fasilitasi pemeliharaan sarpras dan operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui  
Sekretaris Dinas,



**Nur Agustina, S.Psi.MM**  
NIP. 197208172006042003

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



**TUKIJO S.H.**  
NIP. 19701025 200701 1 011

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**ZAENAL MUTTAKIN, S.M**

Penata Muda / III A  
NIP. 19901013 202203 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A Tugas Pokok .....	1
B Struktur Jabatan .....	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	2
A Perjanjian Kinerja .....	2
B Capaian Kinerja .....	2
C Capaian Indikator Kinerja .....	3
BAB III PENUTUP .....	5
A Kesimpulan .....	5
B Rekomendasi .....	5

## BAB I PENDAHULUAN

#### A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas pokok jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
  2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
  3. Melakukan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
  4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
  5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah keluarga pada KAT yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas	600 Keluarga
2	Tercapainya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./ Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan verifikasi dan validasi	6.000 Keluarga
3	Tercapainya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	950 Orang
4	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	1 TMP

### B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan III Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1.	Tercapainya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab./Kota	600 Keluarga	600 Keluarga	581 Keluarga	96.8%
2.	Tercapainya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./ Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan verifikasi dan validasi	6.000 Keluarga	6.000 Keluarga	10.801 Keluarga	180%
3.	Tercapainya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	950 Orang	950 Orang	1.300 Orang	136%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
4.	Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kab./Kota	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%
Rata-rata						128%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 128 % dengan kategori "sangat tinggi/ sangat berhasil"

## BAB III PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 128% dengan kategori "sangat tinggi/sangat berhasil"

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Penelaah Teknis Kebijakan" Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN,  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng.**

NIP. 19740923 200501 1 011

**ZAENAL MUTTAQIN, S.M**

NIP. 19901013 202203 1 002

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penyuluhan Sosial Ahli Pertama selama periode pelaporan, serta sebagai sarana evaluasi dan refleksi atas capaian yang telah diraih maupun tantangan yang dihadapi. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluhan Sosial Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan, baik dari segi sarana, waktu, maupun dukungan teknis. Namun demikian, kami berupaya menjalankan Amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kerja sama selama proses pelaksanaan tugas berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif sekaligus pijakan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Pekalongan, 02 Januari 2025  
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA,



**ASIH MUSTIFAH, S.Sos.**  
Penata Muda / III A  
NIP. 200006072025042002

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok

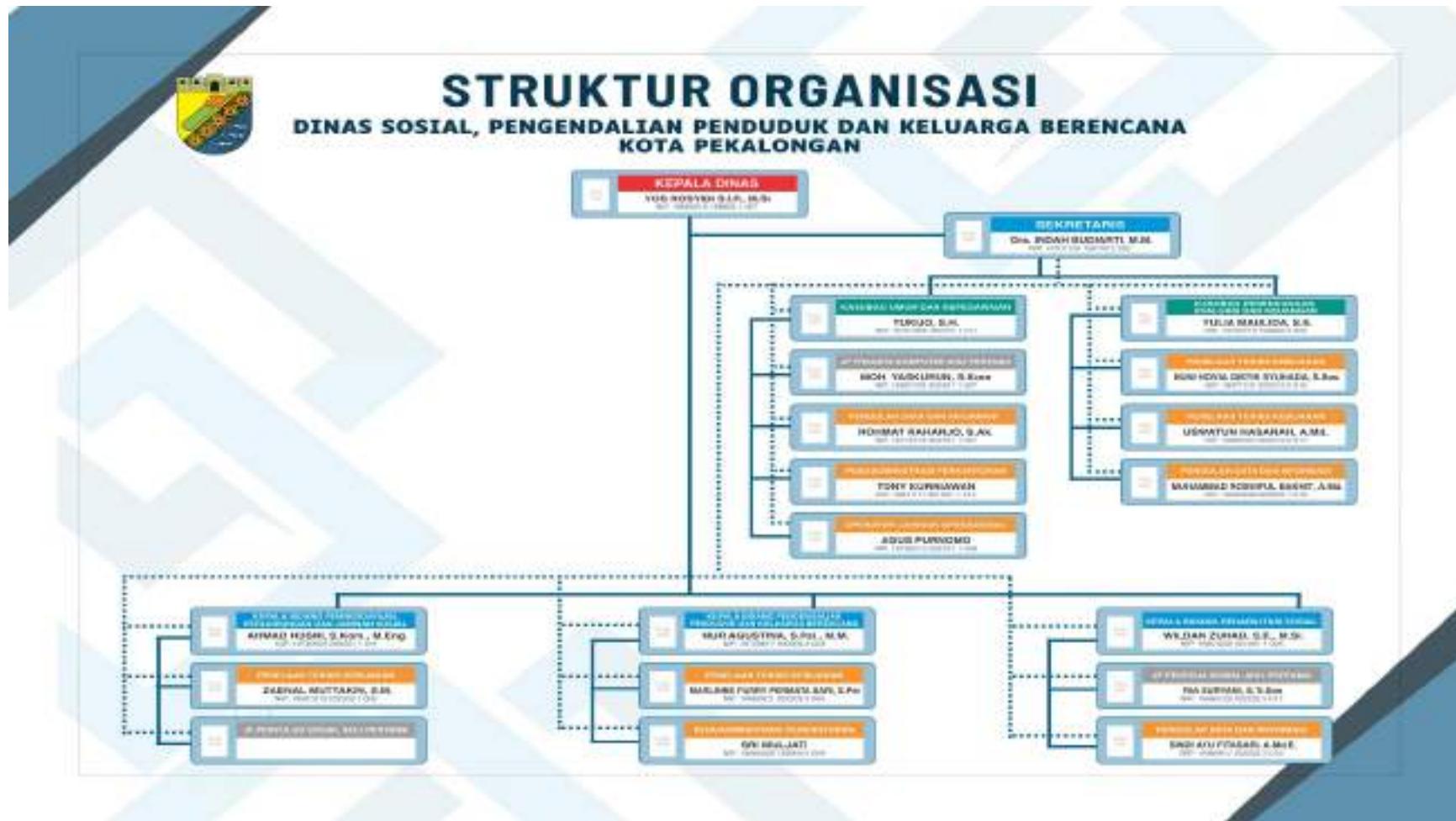
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penyuluhan Sosial Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyuluhan sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat;
2. Mengidentifikasi permasalahan sosial di masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan sosial;
3. Merencanakan dan menyusun materi penyuluhan sosial sesuai kebutuhan masyarakat sasaran;
4. Melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui media penyuluhan sosial, baik secara tatap muka langsung, media cetak, maupun elektronik;
5. Memfasilitasi kelompok sasaran dalam memahami hak dan kewajiban mereka terhadap akses layanan kesejahteraan sosial;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penyuluhan sosial secara berkala kepada atasan langsung dan instansi Pembina
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi profesi, seperti mengikuti diklat, bimbingan, seminar, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan lainnya;
8. Membangun jejaring kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti organisasi sosial, tokoh Masyarakat, dan Lembaga pelayanan sosial untuk mendukung keberhasilan kegiatan penyuluhan sosial;
9. Menyusun dokumentasi kegiatan penyuluhan sosial sebagai bagian dari pelaporan dan arsip kinerja;

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penyuluhan Sosial Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Laporan Kinerja Triwulan IV Penyuluhan Sosial Ahli Pertama /DINSOSP2KB Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## **BAB II**

# **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pelaksanaan program penyuluhan sosial individu/kelompok guna peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab./kota yang optimal	Orang	4 Orang
2	Tercapainya pelaksanaan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial guna peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial yang optimal	Orang	2 Lembaga
3	Tercapainya kegiatan penyuluhan sosial secara langsung dan tidak langsung guna peningkatan mindset positif pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lembaga	2 Kegiatan

### **B. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja “Penyuluhan Sosial Ahli Pertama”  
Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1.	Tercapainya kegiatan penyuluhan sosial secara langsung dan tidak langsung guna peningkatan mindset positif pada pemerlu	Kegiatan Penyuluhan Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga					
2.	Tercapainya pelaksanaan program penyuluhan sosial individu/kelompok guna peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab./kota yang optimal	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100 %
3.	Tercapainya pelaksanaan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial guna peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial yang optimal	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan yang meningkat kapasitasnya	2 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penyuluhan Sosial Ahli Pertama adalah sebesar 83,3% dengan kategori “berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

## **BAB III**

## **PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 83,3%, dengan kategori "berhasil"

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sosial Ahli Pertama Sub Bagian Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 02 Januari 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

PENYULUH SOSIAL AHLI  
PERTAMA,

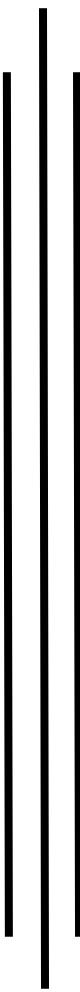


**AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng.**  
NIP. 197409232005011011

**ASIH MUSTIFAH, S.Sos.**  
NIP. 200006072025042002

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

## PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN TAHUN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**MARLINE FURRY PERMATA SARI, S.Psi**

Penata Muda / III A

NIP. 19880611 202203 2 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GAMBAR .....	IV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A    Tugas Jabatan .....	1
B    Struktur Jabatan .....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	3
A    Perjanjian Kinerja .....	3
B    Capaian Kinerja .....	5
C    Capaian Anggaran .....	8
BAB III PENUTUP .....	10
A    Kesimpulan .....	10
B    Rekomendasi .....	10

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Tugas Pokok

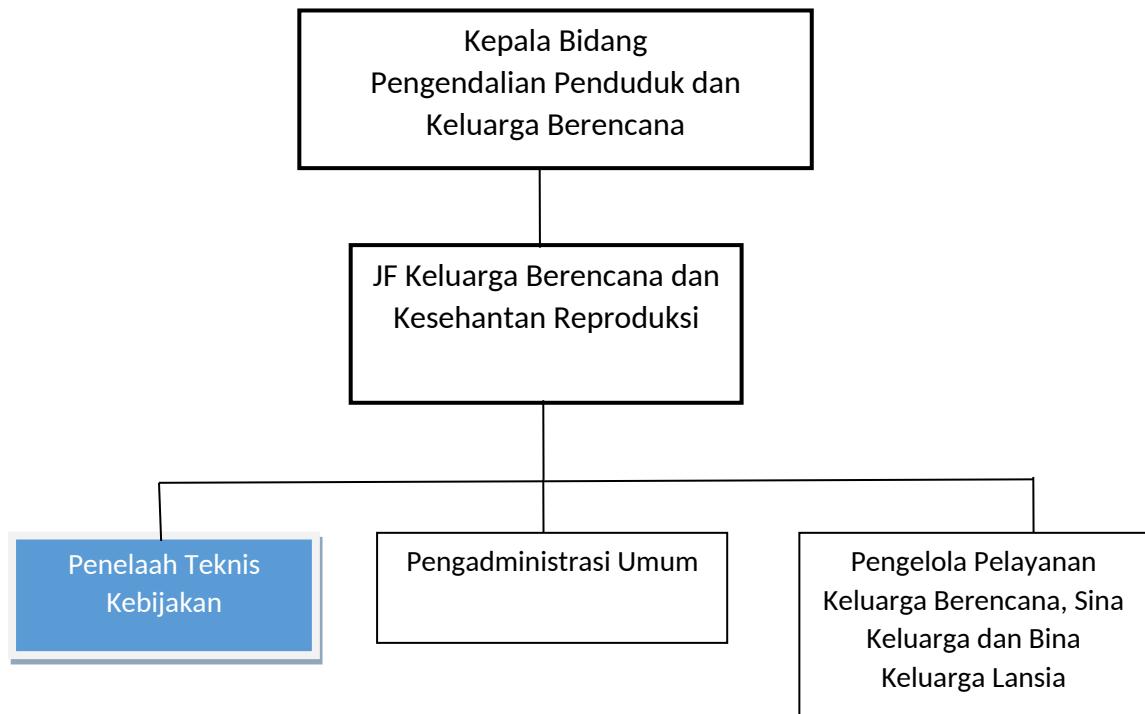
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerja;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatanya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Presentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	Presentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,24 perseribu
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Presentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Tersedia Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan
3	Tersedia Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan
4	Tersedia Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan
5	Tersusun dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
6	Terlaksananya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi
7	Tercapainya Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 Laporan
8	Tersedia Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

#### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja “Penelaah Teknis Kebijakan”**  
**Triwulan IV Tahun 2025**

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1.	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Presentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	100 persen	100 persen	100 %
2.	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	Presentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,24 perseribu	8,24 perseribu	8,3 perseribu	99,23 %
3.	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Presentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen	20,60 persen	32,34 persen	156,9 %
4.	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	100 persen	100 %
5.	Tersedia Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6.	Tersedia Laporan	Jumlah Laporan	27	27	27	100 %

*Laporan Kinerja Triwulan IV/ Penelaah Teknis Kebijakan /DINSOSP2KB Tahun 2025*

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	Laporan	Laporan	
7.	Tersedia Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
8.	Tersedia Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %
9.	Tersusun dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
10.	Terlaksananya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100 %

*Laporan Kinerja Triwulan IV/ Penelaah Teknis Kebijakan /DINSOSP2KB Tahun 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
11.	Tercapainya Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
12.	Tersedia Laporan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %
Rata-rata						104,67 %

Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Analis Kesejahteraan Keluarga adalah sebesar 104,67 % dengan kategori "sangat tinggi/ sangat berhasil"

# BAB III PENUTUP

---

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 104,67% dengan kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam “Penelaah Teknis Kebijakan” Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



**SUPROBO, SH**  
NIP. 19720905 199203 2 005

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**MARLINNE FURRY PERMATA SARI, S.Psi**  
NIP. 19880611 2203 2 004

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN 2025**

**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKJ) Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026  
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN,



**SRI MULIATI**  
Penata Muda TK I  
NIP. 19680529 198903 2 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A    Tugas Jabatan .....	1
B    Struktur Jabatan .....	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	2
A    Perjanjian Kinerja .....	2
B    Capaian Kinerja .....	2
BAB III PENUTUP .....	5
A    Kesimpulan .....	5
B    Rekomendasi .....	5

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

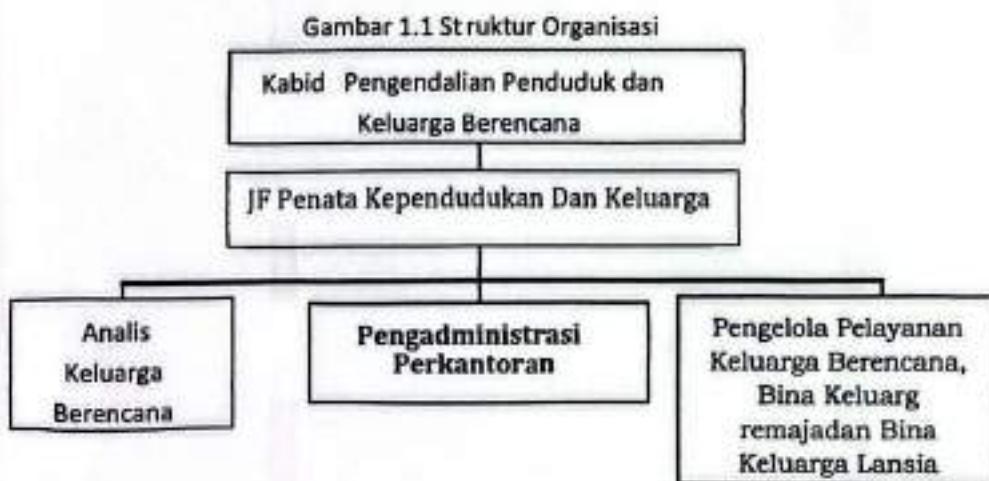
### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Analis Masalah Sosial mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar disposisi pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.
3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian.
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

### B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Perkantoran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Perkantoran**  
**Tahun 2025**

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK ((Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 %
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19 )	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15 – 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19 )	8,24 perseribu
3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen

4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Percentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %
5	Tercapainya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen
6	Tercapainya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan
7	Tercapainya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan
8	Tercapainya Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang
9	Tercapainya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan

10.	Tercapainya Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	5 Organisasi
-----	---	--	--------------

#### B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Pengadministrasian Perkantoran Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan IV  
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya ketersediaan dokumen KKBPK ((Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 %	100%	100 %	100 %
2	Tercapainya Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 )	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 - 19 )	8,24 perseribu	8,3 perseribu	8,3 perseribu	99,27 %

3	Tercapainya kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persentase kepersertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,60 persen	32,34 persen	32,34 persen	156,9 %
4	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Tercapainya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	8	8	100 %
6	Tercapainya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	16	16	100 %

7	Tercapainya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12	12	100 %
8	Tercapainya Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang	1191	1191	104,7 %
9	Tercapainya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1	1	100 %
10	Tercapainya Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UUPKS)	5 Organisasi	5	5	100 %
	<i>Rata-rata Capaian</i>					106 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasian Perkantoran adalah sebesar 106 % dengan kategori "Sangat tinggi"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Penempatan target yang sesuai

## **BAB III**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 106 %, dengan kategori "sangat tinggi"

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**SURROBO, SH**  
NIP. 19720905 199203 2 005

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN,



**SRI MULJATI**  
NIP. 19680529 198903 2 004

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengolah Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengolah Data dan Informasi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengolah Data dan Informasi melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026  
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**SINDI AYU FITASARI, A.Md.E**  
Pengatur / II C  
NIP. 19980617 202203 2 019

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Tugas Pokok

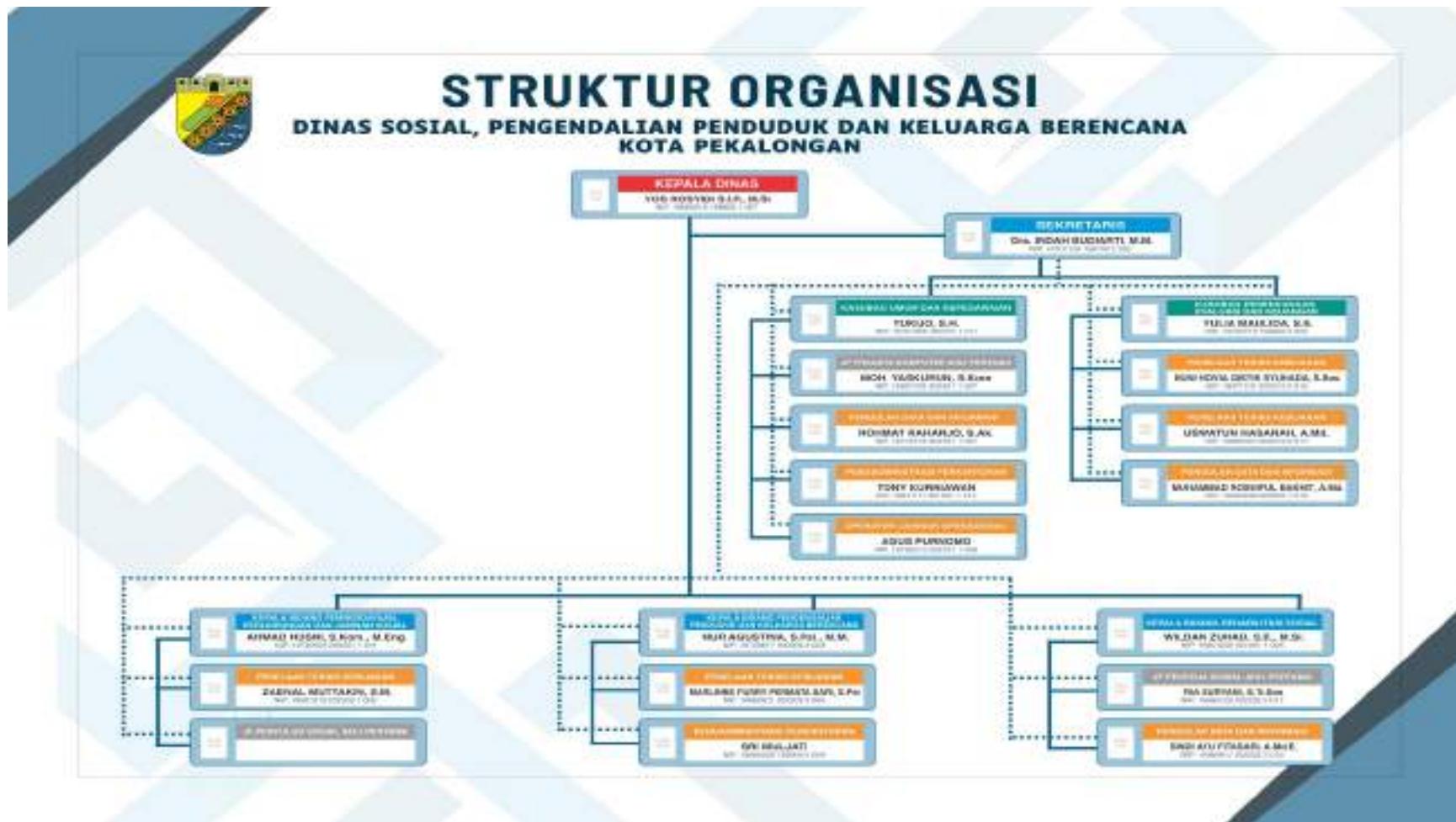
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengolah Data dan Informasi mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengelola rencana program kerja, bahan dan alat pelengkapannya bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Membantu melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Membantu melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Membantu melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Membantu membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengolah Data dan Informasi, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## **BAB II**

# **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengolah Data dan Informasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi  
Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Uraian tugas</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang

### **B. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

### Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi

#### Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	65 Orang	441 Orang	678,46 %

2.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	65 Orang	441 Orang	678,46 %
3.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11 Orang	11 Orang	13 Orang	118,18 %
4.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pernakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 orang	480 orang	96%
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	500 orang	504 orang	100,80%
Rata-rata						334,38%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 334,38% dengan kategori “sangat berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

# BAB III

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 334,38%, dengan kategori “sangat berhasil”

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**WILDAN ZUHAD,SE.,M.Si**  
NIP. 19851026 201001 1 005



**SINDI AYU FITASARI, A.Md, E**  
NIP. 19980617 202203 2 019

# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

## **PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR'

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026  
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,



**RIA SURYANI, S.Tr.Sos**  
Penata Muda / III A  
NIP. 19960129 202203 2 017

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pekerja Sosial Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Membantu meyusun dan menganalisa kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
5. Membantu melaksanakan kegiatan intervensi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Membantu melaksanakan kegiatan evauasi hasil intervensi;
7. Membantu melaksanakan kegiatan terminasi;
8. Membantu melaksanakan kegiatan rujukan;
9. Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Laporan Kinerja Triwulan IV Pekerja Sosial Ahli Pertama /DINSOSP2KB Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## **BAB II**

# **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Tahun 2025

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang
2	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	903 Orang
3	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	83 Orang
6	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Orang	500 Orang

*Laporan Kinerja Triwulan IV Pekerja Sosial Ahli Pertama /DINSOSP2KB Tahun 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota		

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja "Pekerja Sosial Ahli Pertama"

*Laporan Kinerja Triwulan IV Pekerja Sosial Ahli Pertama / DINSOSP2KB Tahun 2025*

Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	65 Orang	441 Orang	678,46%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	923 Orang	923 Orang	935 Orang	101,30%
3.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	60 Orang	60 Orang	120 Orang	200%
4.	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%

*Laporan Kinerja Triwulan IV Pekerja Sosial Ahli Pertama / DINSOSP2KB Tahun 2025*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
	(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	83 Orang	83 Orang	166 Orang	200%
6	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	500 Orang	500 orang	480 Orang	96%
Rata-rata						229,29%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pekerja Sosial Ahli Pertama adalah sebesar 229,29% dengan kategori “sangat berhasil” Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

## **BAB III**

## **PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 229.29%, dengan kategori "sangat berhasil"

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Ahli Pertama Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,



PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA,



**WILDAN ZUHAD, S.E., M.Si**

NIP. 19851026 201001 1 005

**RIA SURYANI, S.Tr, Sos**

NIP. 19960129 202203 2 017

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**

**BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2025  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**USWATUN HASANAH, A.Md**  
Pengatur Tk.I-2D  
NIP. 19960424 202012 2 017

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

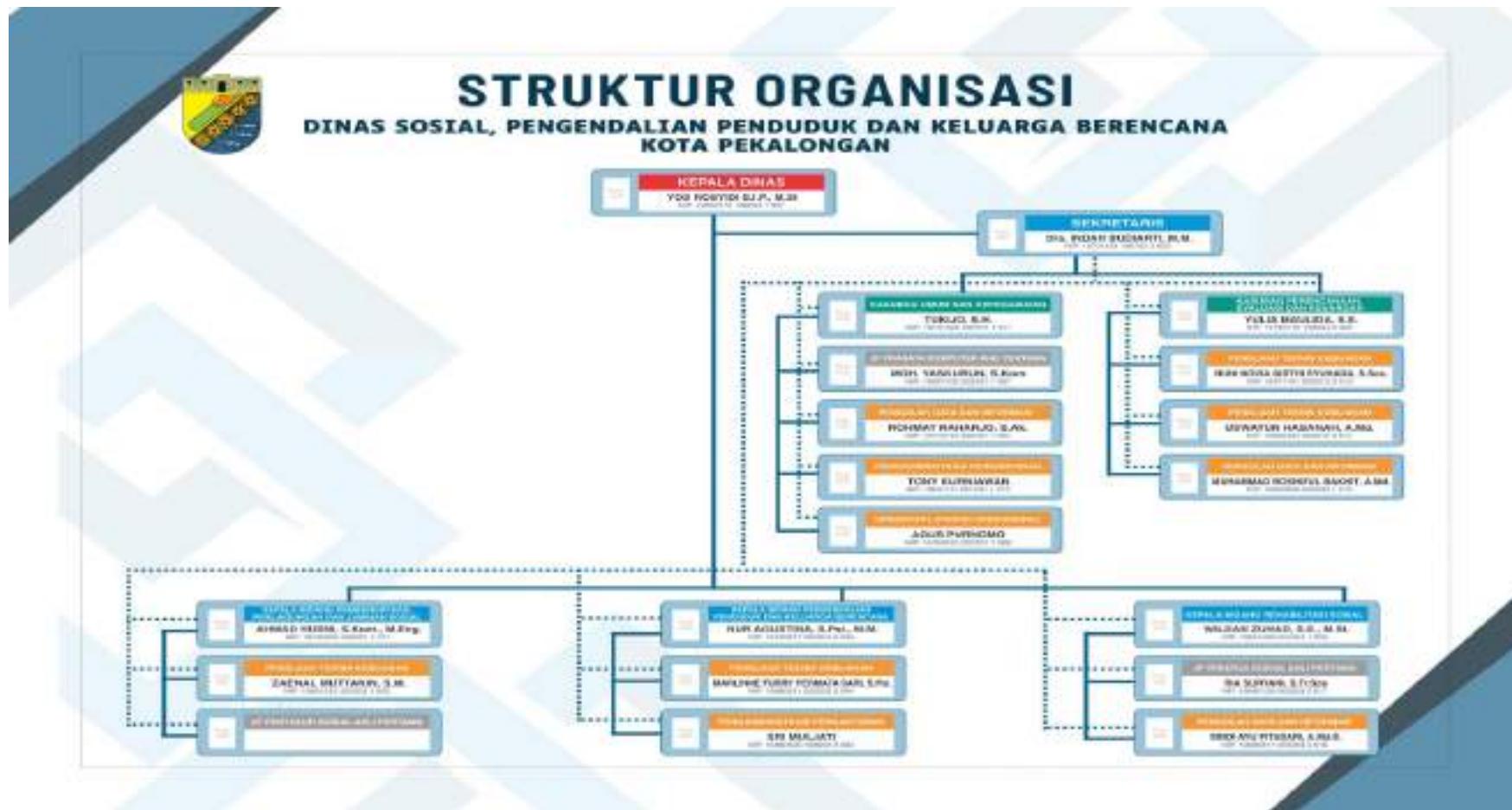
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20orang/bulan
2	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan
3	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen
4	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

#### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025**

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	100%
2	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
3	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keungan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100 %
4	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
	<b>Rata-rata Capaian</b>					100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

## BAB III

# PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan katerogi "sangat berhasil"

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN  
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN,



PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**YULIA MAULIDA, SE**  
NIP. 19790719 199803 2 002

**USWATUN HASANAH,A.Md**  
NIP. 19960424 202012 2 017

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKJ) Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Januari 2026  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos**  
Penata Muda Tk. I/ III B  
NIP. 19971101 202012 2 015

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menerima bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## **BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

### **A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025**

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen
2	Tercapainya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	2 Dokumen
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15 Laporan
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan

### **B. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian yang diharapkan}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Tercapainya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
<i>Rata-rata Capaian</i>						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100 % dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

## BAB III

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan kategori "sangat berhasil"

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Mengetahui,

KEPALA SUB BAGIAN RENVAL DAN  
KEUANGAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**YULIA MAULIDA, SE**  
NIP. 19790719 199803 2 002



**NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos**  
NIP. 19971101 202012 2 015

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK**

**DAN KELUARGA BERENCANA**

**KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengolah Data dan Informasi TRIWULAN IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengolah Data dan Informasi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengolah Data dan Informasi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Pengolah Data dan Informasi



Muhammad Roshiful Bakhit, A.Md

Pengatur

NIP. 19950606 202203 1 015

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A    Tugas Jabatan .....	3
B    Struktur Jabatan .....	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	4
A    Perjanjian Kinerja .....	4
B    Capaian Kinerja .....	5
BAB III PENUTUP .....	7
A    Kesimpulan .....	7
B    Rekomendasi .....	7

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

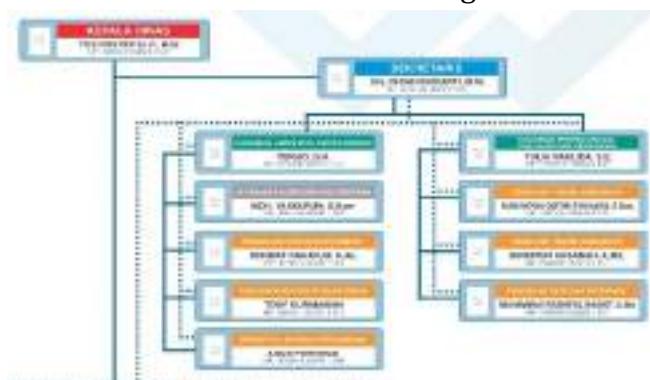
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengolah Data dan Informasi mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya. Agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

### B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengolah Data dan Informasi, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

---

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengolah Data dan Informasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Pengolah Data dan Informasi  
Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	20 Orang
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi TRIWULAN IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi TRIWULAN IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja Pengolah Data dan Informasi  
TRIWULAN IV Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d TRIWULAN IV	Realisasi s.d TRIWULAN IV	% Capaian
1	Tercapainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d TRIWULAN IV	Realisasi s.d TRIWULAN IV	% Capaian
2	Tersedianya Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji & Tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 %
3	Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100 %
4	Tercapainya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
5	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
<i>Rata-rata Capaian</i>						100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 100 % dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada TRIWULAN IV ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai;
2. Ketepatan dalam menentukan skala prioritas pekerjaan;
3. Koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

# BAB III

---

# PENUTUP

---

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengolah Data dan Informasi adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengolah Data dan Informasi TRIWULAN IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai target yang direncanakan;
2. Ketepatan dalam penyusunan target kinerja.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui

Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan,



**Yulia Maulida, S.E**  
NIP. 19790719 199803 2 002



**Muhammad Roshiful Bakhit, A.Md**  
NIP. 19950606 202203 1 015

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Fungsional Pranata Komputer

Ahli Pertama



**MOH. YASKURUN, S.Kom**

NIP. 199511052024211007

---

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A    Tugas Jabatan .....	1
B    Struktur Jabatan .....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	3
A    Perjanjian Kinerja .....	3
B    Capaian Kinerja .....	4
BAB III PENUTUP .....	5
A    Kesimpulan .....	6
B    Rekomendasi .....	6

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Komputer mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
2. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
3. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
4. Melakukan implementasi data model;
5. Melakukan implementasi business intelligence;
6. Menyusun taksonomi data;
7. Menyusun arsitektur data;
8. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
9. Melakukan perancangan layanan akses data;
10. Melakukan implementasi rancangan layanan akses data;
11. Melakukan ingestion data;
12. Melakukan implementasi rancangan integrasi data;
13. Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data;
14. Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi;
15. Melakukan validasi kebutuhan informasi;
16. Menyusun dokumentasi rancangan database;
17. Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system;
18. Melakukan backup atau pemulihan data;
19. Menyusun tingkat kinerja database;
20. Melakukan peningkatan kinerja database;
21. Menyusun rencana retensi data;
22. Melakukan evaluasi teknologi data;
23. Melakukan pengadministrasian teknologi data;
24. Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data;
25. Mengelola pengguna dan hak akses data;
26. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi;
27. Melakukan pengumpulan data audit teknologi informasi menggunakan metode tertentu;
28. Menerapkan rancangan fisik system jaringan computer kompleks;
29. Menerapkan rancangan logis system pengamanan jaringan computer kompleks;
30. Menyusun prosedur pemanfaatan system jaringan;
31. Melakukan uji coba system jaringan computer kompleks;
32. Melakukan evaluasi uji coba system jaringan computer sederhana;
33. Menyusun dokumentasi penggunaan system jaringan computer;
34. Melakukan optimalisasi system jaringan;
35. Melakukan deteksi dan /atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks;
36. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis;
37. Melakukan pengujian infrastruktur teknologi informasi;
38. Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;

39. Melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi;
40. Melakukan pengaturan akses keamanan fisik teknologi informasi;
41. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi;
42. Menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi;
43. Menyiapkan peralatan video conference (streaming), motioring peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengukur layout;
44. Melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi;
45. Melakukan perancangan system informasi;
46. Membuat program aplikasi system informasi;
47. Mengembangkan program aplikasi system informasi;
48. Melakukan penyiapan data untuk uji coba system informasi;
49. Melakukan uji coba system informasi;
50. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan kerusakan system informasi;
51. Menyusun petunjuk operasional program aplikasi system informasi;
52. Menyusun dokumentasi pengembangan system informasi;
53. Melakukan instalasi, upgrade, dan konfigurasi system operasi dan/atau aplikasi;
54. Melakukan data crawling, data feeding, dan data loading;
55. Melakukan manipulasi data;
56. Menyusun definisi system proyeksi pada suatu data spasial;
57. Membuat peta tematik rinci;
58. Melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci;
59. Mengoperasikan tools untuk membuat storyboard;
60. Membuat flowchart untuk pemrograman multimedia;
61. Melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
62. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak;
63. Membuat prototype kompleks pada program multimedia; dan
64. Membuat program multimedia kompleks.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

---

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama  
Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	4 Paket
2	Melakukan backup atau pemulihan data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan backup atau pemulihan data	250 Backup
3	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	12 Paket
4	Mengembangkan program aplikasi system informasi	Jumlah penyelesaian dalam Mengembangkan program aplikasi system informasi	1 Paket

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
5	Melakukan pengadministrasian teknologi data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pengadministrasian teknologi data	100 dokumen

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama**  
**Triwulan IV Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV	% Capaian
1	Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan instalasi dan konfigurasi database management system	4 Paket	3 Paket	3	100%
2	Melakukan backup atau pemulihan data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan backup atau pemulihan data	250 Backup	250	250	100%
3	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	12 Paket	12	12	100%
4	Mengembangkan program aplikasi system informasi	Jumlah penyelesaian dalam Mengembangkan program aplikasi system informasi	1 Paket	1	1	100%
5	Melakukan pengadministrasian teknologi data	Jumlah penyelesaian dalam Melakukan pengadministrasian teknologi data	100 dokumen	100	100	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>						100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini antara lain adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar tim serta dukungan dari pimpinan dan rekan kerja, pemahaman yang memadai terhadap tugas dan fungsi jabatan disertai kemampuan teknis di bidang teknologi informasi, perencanaan kerja yang terstruktur dan terukur, serta komitmen dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

## BAB III

---

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan kepada pimpinan atau instansi untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi SDM TI melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis agar Pranata Komputer mampu mengikuti perkembangan dan inovasi teknologi informasi.
2. Penguatan koordinasi lintas bidang dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu, dan efisien.
3. Peningkatan kinerja dan inovasi pegawai melalui penyediaan dukungan sarana dan waktu, serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala disertai pembinaan yang adil.

---

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui  
Kepala Subbagian Umum  
Dan Kepegawaian



**TUKIJO, S.H.**  
NIP. 197010252007011011

Fungsional Pranata Komputer  
Ahli Pertama



**MOH. YASKURUN, S.Kom**  
NIP. 199511052024211007

---

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB BAGIAN**  
**UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DINOS DINSOS P2KB**  
**KOTA PEKALONGAN**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan Operasional Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



**TONY KURNIAWAN**

PENGATUR Tk.I

NIP. 19841111 201001 1 014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A    Tugas Jabatan .....	5
B    Struktur Jabatan .....	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	6
A    Perjanjian Kinerja .....	6
B    Capaian Kinerja .....	6
BAB III PENUTUP .....	9
A    Kesimpulan .....	9
B    Rekomendasi .....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 .....	6
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal .....	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 .....	7

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi -----	5
--------------------------------------	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor.
2. Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias.
3. Melakukan perawatan peralatan kebersihan.
4. Menyiapkan dan menyusun data /laporan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional  
Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Membersihkan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor	Tercapainya kebersihan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor	100%
2	Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias	Terawatnya dan terpeliharanya tanaman perindang dan tanaman hias	100%
3	Melakukan perawatan peralatan kebersihan	Terawatnya peralatan kebersihan	100%
4	Menyiapkan dan menyusun data /laporan	Tersedia dan tersusunnya data /laporan	100%
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	100%

### B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional  
Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Membersihkan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor;	Tercapainya kebersihan ruangan, halaman, saluran, kamar mandi dan lingkungan Kantor	100%	25%	25%	100%
2	Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman perindang dan tanaman hias;	Terawatnya dan terpeliharanya tanaman perindang dan tanaman hias	100%	25%	25%	100%
3	Melakukan perawatan peralatan kebersihan;	Terawatnya peralatan kebersihan	100%	25%	25%	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
4	Menyiapkan dan menyusun data /laporan;	Tersedia dan tersusunnya data /laporan	100%	25%	25%	100%
5	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	100%	25%	25%	100%
					<i>Rata-rata Capaian</i>	100%

## **BAB III**

## **PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan tercapai.
2. Penetapan indicator kinerja individu yang mengacu pada indicator kinerja organisasi

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Operator Layanan Operasional



**TUKIJO, S.H**  
NIP. 19701025 200701 1 011



**TONY KURNIAWAN**  
NIP. 19841111 201001 1 014

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**  
**OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramu Kebersihan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Operator Layanan Operasional Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerjadan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Operator Layanan Operasional Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Pramu Kebersihan,



AGUS PURNOMO  
NIP. 19790313 200701 1 008

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54B Tahun 2020 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Operator Layanan Operasional mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitasi yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali.
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak.
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas

## B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional Dinas Sosial P2KB sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## BAB II- AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan pénugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan

## B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

### Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Operator Layanan Operasional Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

## Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100 %
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100 %
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100 %

4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100 %
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
<i>Rata-rata Capaian</i>						100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100 % dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Penempatan target yang sesuai.
2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

## BAB III

# PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, dengan kategori "sangat berhasil"

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Operator Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial P2KB Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian,

Operator Layanan Operasional,

  
**Tukijo, SH**  
NIP. 19701025 2007 01 011

  
**Agus Purnomo**  
NIP. 19790313 200701 1 008